

## Peran Edukasi dan Pelatihan dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Perbankan

Angelina Reski Apriliana

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,  
Indonesia

Alamat : Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Email Korespondensi : [angelinasinaga345@gmail.com](mailto:angelinasinaga345@gmail.com)

***Abstract** Banking is crucial in efforts to prevent corruption, serving as the frontline in financial management and transactions. This article examines the role of education and training in combating corruption within the banking sector. The study aims to demonstrate that corruption in banking can undermine public trust and economic stability. I employ a literature review and observations of education and training initiatives aimed at corruption prevention in banking. Key issues identified include employees' inadequate understanding of work ethics and anti-corruption policies, along with insufficient systematic training. This research analyzes various education and training programs implemented in banks and assesses their effectiveness in enhancing employee awareness and commitment to anti-corruption practices. I highlight that comprehensive education and continuous employee training are essential for significantly mitigating the risk of corruption in banking by fostering a transparent and ethical organizational culture. It is critical for banking institutions to enhance anti-corruption awareness among their employees. Training programs should engage all employee levels and include regular evaluations to assess their effectiveness. Ultimately, the goal is to create a safer banking environment free from corrupt practices.*

**Keywords :** Banking, Corruption Prevention, Employees, Corruption, Public Trust.

**Abstrak** Perbankan memegang peran penting dalam upaya pencegahan korupsi karena mengingat sektor ini merupakan garda terdepan dalam pengelolaan keuangan dan transaksi. Artikel ini mengeksplorasi peran edukasi dan pelatihan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa korupsi di sektor perbankan dapat merusak kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Metode penelitian yang saya gunakan adalah tinjauan literatur dan observasi terhadap edukasi dan pelatihan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Perbankan. Masalah yang diidentifikasi adalah minimnya pemahaman karyawan tentang etika kerja dan kebijakan anti-korupsi, serta kurangnya pelatihan yang sistematis. Dalam penelitian ini, Saya menganalisis berbagai program edukasi dan pelatihan yang telah diterapkan dalam perbankan, serta efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen karyawan Bank terhadap praktik anti-korupsi. Dalam penelitian ini Saya menegaskan bahwa edukasi yang komprehensif dan pelatihan karyawan yang berkelanjutan dapat secara signifikan mengurangi risiko korupsi dalam Perbankan, dengan membangun budaya organisasi yang transparan dan etis. Saat ini sangat diperlukan institusi karyawan perbankan untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Program pelatihan yang dilakukan harus melibatkan semua level karyawan, serta menerapkan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan. Dengan demikian diharapkan lingkungan perbankan dapat menjadi lebih aman dan terhindar dari praktik korupsi.

**Kata Kunci :** Perbankan, Pencegahan Korupsi, Karyawan, Korupsi, Kepercayaan Publik.

### 1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Di Indonesia, pemerintah dan berbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah memfokuskan perhatian mereka pada upaya pemberantasan korupsi di sector ini. Praktik korupsi di Indonesia tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama, khususnya di sector perbankan yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam memerangi korupsi adalah melalui edukasi dan pelatihan.

Edukasi yang tepat dapat meningkatkan pemahaman karyawan tentang integritas dan etika karyawan, serta memberikan pengetahuan mengenai dampak negative korupsi bagi masyarakat dan negara. Selain itu, pelatihan yang sistematis dapat membekali pegawai bank dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan korupsi. Menurut Transparency International (2021), institusi yang menerapkan program edukasi dan pelatihan secara terstruktur cenderung memiliki tingkat korupsi yang biasanya lebih kecil dibandingkan yang tidak melakukan program edukasi dan pelatihan. Ini menunjukkan bahwa pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan dari tindak korupsi.

Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan landasan hukum yang krusial dalam usaha pencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Selain itu, Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membahas tentang Perbankan juga menekankan pentingnya penerapan prinsip ketelitian dan transparansi dalam aktivitas perbankan untuk mencegah praktik korupsi. Dengan demikian, upaya pencegahan yang diambil dalam sektor perbankan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun budaya integritas. Edukasi dan pelatihan mengenai praktik anti korupsi menjadi sangat krusial. Menurut buku "*Corruption: A Very Short Introduction*" oleh Leslie Holmes (2015), untuk melawan korupsi dengan efektif, diperlukan pemahaman mendalam tentang perilaku koruptif dan sistem penyimpangan yang ada. Artikel ini akan membahas berbagai inisiatif dan langkah-langkah untuk edukasi dan pelatihan anti korupsi di sektor perbankan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Edukasi yang memadai tentang etika, integritas, dan dampak korupsi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pegawai perbankan. Selain itu, pelatihan yang efektif dapat membekali mereka dengan keterampilan untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi. Sebagaimana diungkapkan oleh KPK dalam laporan tahunannya, institusi yang menerapkan program edukasi dan pelatihan secara terstruktur menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat korupsi (KPK, 2021).Buku "*Corruption: A Very Short Introduction*" oleh Leslie Holmes (2015) juga menekankan bahwa edukasi dapat memberdayakan individu untuk mengenali dan melawan praktik korupsi. Dalam penelitian ini, artikel ini bertujuan untuk

menggal lebih banyak informasi tentang peran edukasi dan pelatihan dalam memerangi korupsi di sektor perbankan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya.

Upaya pencegahan korupsi dalam perbankan melibatkan berbagai langkah strategis, termasuk penguatan regulasi, penerapan sistem pengawasan internal yang ketat, dan pelatihan pegawai. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu fondasi utama dalam mencegah praktik korupsi. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 membahas tentang Perbankan Syariah mengungkapkan bahwa, setiap lembaga perbankan diwajibkan untuk menerapkan prinsip – prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai tentang etika kerja dan kepatuhan terhadap regulasi juga sangat penting. Melalui program pelatihan yang terstruktur, pegawai dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi dan melaporkan potensi korupsi. Sebuah laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa institusi yang secara aktif menerapkan pelatihan anti korupsi menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus korupsi (KPK, 2021).

Lebih lanjut lagi, pendekatan proaktif dalam edukasi dan pelatihan di sektor perbankan dapat menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Hal ini sejalan dengan pendapat Arie S. Soesilo (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran dan pemahaman yang tinggi di kalangan karyawan dapat menjadi barrier (penghalang) efektif terhadap korupsi. Dengan demikian, artikel ini akan membahas secara mendalam tentang peran edukasi dan pelatihan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan perbankan, serta mengkaji berbagai program yang telah diterapkan dan dampaknya terhadap pengurangan praktik korupsi. Melalui program-program edukasi dan pelatihan yang sistematis dan pelatihan yang efektif, karyawan bank dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan melawan korupsi dalam lingkungan perbankan.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran edukasi dan pelatihan dalam pencegahan korupsi di lingkungan perbankan tidak dapat diabaikan, karena pendidikan etika yang sistematis membantu membangun kesadaran karyawan mengenai risiko korupsi dan pentingnya akuntabilitas. Dan juga, pelatihan berkelanjutan memberikan karyawan alat yang mereka butuhkan untuk menghadapi situasi sulit di tempat kerja dan membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip integritas. Hal ini juga bermanfaat untuk pengembangan kebijakan internal yang jelas mengenai pelaporan korupsi dan mekanisme penanganan menjadi

krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan dan kejujuran. Selain itu, keterlibatan pimpinan dalam program edukasi dan pelatihan dalam Perbankan menegaskan komitmen institusi terhadap pencegahan korupsi. Dan tahap terakhir adalah, evaluasi dan umpan balik terhadap program-program tersebut penting untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan tetap relevan dan efektif dalam menciptakan budaya anti-korupsi antar karyawan Bank. Dengan strategi ini diharapkan, perbankan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan korupsi dan memastikan bahwa mereka beroperasi dengan integritas yang tinggi.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan permasalahan utama yaitu bagaimana peran edukasi dan pelatihan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan perbankan serta penyebab terjadinya tindakan korupsi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan korupsi?

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran edukasi dan pelatihan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan perbankan, serta pentingnya bagi seluruh karyawan Bank untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan melawan korupsi dalam lingkungan perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada salah satu karyawan Bank Sinarmas yaitu Ibu Indriyani Vera, untuk menganalisis bagaimana peran edukasi dan pelatihan dalam upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan perbankan yang sangat penting. Dalam wawancara Ibu Indriyani menyampaikan bahwa edukasi dan pelatihan merupakan alat yang sangat efektif dalam pencegahan korupsi di lingkungan perbankan. Dengan membangun kesadaran etika, meningkatkan keterampilan, mengembangkan kebijakan yang jelas, melibatkan pimpinan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan, institusi perbankan dapat menciptakan budaya integritas yang kuat. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi risiko korupsi tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

## **4. PEMBAHASAN**

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dapat merugikan ekonomi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan, termasuk perbankan. Di tengah kompleksitas operasional perbankan, korupsi sering kali muncul dari praktik-praktik yang tidak transparan dan kurangnya pemahaman tentang etika bisnis. Oleh karena itu, edukasi dan

pelatihan menjadi sangat penting dalam membentuk budaya integritas dan akuntabilitas di lingkungan perbankan. Melalui program-program edukasi yang sistematis dan pelatihan yang efektif, karyawan bank dapat dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan melawan korupsi. Penelitian ini akan membahas pentingnya peran edukasi dan pelatihan dalam pencegahan korupsi serta memberikan saran strategis untuk implementasinya di institusi perbankan. Pencegahan korupsi dalam bank memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan yang jelas, edukasi karyawan, transparansi, pengawasan, dan komitmen dari pimpinan. Upaya ini tidak hanya melindungi integritas institusi perbankan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Pencegahan korupsi disektor perbankan sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan kepercayaan public terhadap Bank. Untuk menjamin upaya pencegahan korupsi dalam Bank, penting untuk menerapkan berbagai strategi dan praktik terbaik yang telah dibahas dalam literature terkait. Berikut beberapa cara yang bias dilakukan untuk pencegahan praktik korupsi dalam lingkungan perbankan yang antara lain adalah kebijakan anti korupsi yang jelas, pelatihan dan edukasi karyawan Bank, sistem pengawasan internal, transparansi dan akuntabilitas, mendorong pelaporan dan perlindungan *whistleblower*, keterlibatan pimpinan, audit dan evaluasi rutin.

- a. Kebijakan Anti – korupsi : Pengembangan program anti-korupsi untuk karyawan bank adalah langkah penting dalam membangun budaya integritas dan mencegah praktik korupsi. Karyawan perlu mendapatkan pelatihan tentang etika bisnis, risiko korupsi, dan cara-cara untuk mencegahnya. Edukasi ini harus dilakukan secara berkala untuk menjaga kesadaran anti korupsi pada karyawan Bank. Pelatihan dapat mencakup workshop, seminar, dan program e-learning. Kasus-kasus nyata dan simulasi situasi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap anti korupsi. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan agar bank dapat mengurangi risiko korupsi dan membangun kepercayaan baik di dalam organisasi maupun di kalangan pemangku kepentingan Bank.
- b. Pelatihan dan Edukasi Karyawan Bank : Pelatihan dan edukasi karyawan bank adalah komponen penting dalam upaya membangun budaya organisasi yang kuat, mencegah risiko korupsi, dan meningkatkan kualitas layanan. Kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan rutin bagi karyawan mengenai etika bisnis dan pencegahan korupsi. Karyawan perlu memahami risiko korupsi dan cara melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Memberikan pemahaman kepada karyawan tentang pentingnya etika dalam

pengambilan keputusan sehari-hari. Karyawan diharapkan dapat mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memilih keputusan yang sesuai dengan nilai – nilai etika Perbankan. Pelatihan ini bertujuan untuk mendidik karyawan tentang praktik korupsi dan bagaimana cara menghindarinya. Dengan fokus pada kesadaran etika, pemahaman kebijakan, dan keterampilan komunikasi, Bank dapat memastikan bahwa karyawan dalam lingkungan perbankan tidak hanya memenuhi ekspektasi pekerjaan tetapi juga berkontribusi pada reputasi dan keberhasilan organisasi perbankan.

- c. Sistem Pengawasan Internal : Sistem pengawasan internal di bank merupakan rangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan hukum, regulasi, dan kebijakan internal, serta untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, termasuk praktik korupsi. Sistem pengawasan internal yang efektif sangat penting bagi bank untuk mencegah kecurangan, menjaga kepatuhan, dan memastikan integritas laporan keuangan. Dengan menerapkan komponen yang tepat dan mematuhi prinsip-prinsip pengawasan yang baik, bank dapat mengelola risiko dengan lebih baik. Adapun komponen sistem pengawasan Internal dalam Bank yaitu :
  1. Lingkungan Pengendalian : Ini mencakup budaya organisasi, etika, dan komitmen manajemen terhadap pengendalian yang baik. Lingkungan ini menjadi dasar bagi semua kontrol lainnya.
  2. Penilaian Risiko : Proses untuk memahami dan mengevaluasi risiko yang mungkin akan mempengaruhi pencapaian tujuan bank. Risiko ini termasuk risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional.
  3. Kegiatan Pengendalian : Prosedur dan kebijakan yang ditetapkan untuk mengurangi risiko. Ini termasuk pemisahan tugas, kontrol akses, dan audit berkala.
  4. Informasi dan Komunikasi : Mengedarkan informasi yang relevan kepada semua tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan responsif.
  5. Pemantauan : Proses untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan internal secara terus-menerus dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
- d. Transparansi dan Akuntabilitas : transparansi dan Akuntabilitas merupakan dua nilai penting dalam pengelolaan institusi keuangan, termasuk bank. Keduanya berperan

dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan, mencegah korupsi, dan memastikan bahwa bank beroperasi dengan integritas. Transparansi mengacu pada sejauh mana informasi yang relevan tentang operasi, keuangan, dan kebijakan bank tersedia dan dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat, bank dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan regulator. Akuntabilitas adalah kewajiban suatu entitas, termasuk bank, untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambilnya kepada pemangku kepentingan. Transparansi dan akuntabilitas saling terkait. Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit ditegakkan karena pemangku kepentingan tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja bank. Sebaliknya, jika suatu institusi tidak menunjukkan akuntabilitas, transparansi menjadi kurang berarti karena informasi yang tersedia tidak akan digunakan untuk menilai tindakan atau keputusan. Transparansi dan akuntabilitas adalah aspek kunci dalam pengelolaan bank yang baik sehingga dapat mencegah praktik korupsi.

- e. Mendorong Pelaporan Dan Perlindungan Whistleblower : Whistleblower adalah individu yang melaporkan tindakan ilegal, tidak etis, atau penyimpangan dalam organisasi dalam Bank, baik itu perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi lainnya. Pelaporan ini bisa mencakup berbagai isu, seperti penipuan, korupsi, pelanggaran hukum, atau pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan bagi whistleblower sangat penting untuk mendorong mereka guna melaporkan masalah korupsi tanpa takut akan konsekuensi negative dalam lingkungan perbankan. Dalam kebijakjan ini sangat penting karena mendorong pelaporan karyawan dan memberikakn perlindungan bagi whistleblower adalah langkah krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan etis serta terhindar dari praktik korupsi. Beberapa aspek yang meliputi perlindungan yaitu :
1. Kerahasiaan : Identitas whistleblower harus dijaga kerahasiaannya agar mereka tidak menghadapi pembalasan.
  2. Larangan Pembalasan : Undang-undang dan kebijakan organisasi harus melarang segala bentuk pembalasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  3. Dukungan Hukum : Whistleblower sering kali memerlukan dukungan hukum untuk melindungi hak-hak mereka dan menghadapi potensi tindakan hukum dari pihak yang dilaporkan.

- f. Keterlibatan Pimpinan : Keterlibatan pimpinan dalam upaya pencegahan korupsi di sektor perbankan sangat krusial, karena pimpinan memiliki peran strategis dalam menetapkan budaya dan kebijakan organisasi. Pimpinan dalam perbankan atau perusahaan lainnya harus memberikan teladan dalam etika dan integritas. Pimpinan perlu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang jelas dalam Bank agar seluruh karyawan dapat melaksanakan teladan seperti yang diharapkan pimpinan. Keterlibatan aktif pimpinan dalam pencegahan korupsi sangat penting untuk membangun dan memelihara integritas dalam sektor perbankan. Dengan menetapkan kebijakan yang jelas, menciptakan budaya etika, dan memberikan dukungan yang diperlukan, pimpinan dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya memerangi korupsi dan juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan etis.
- g. Audit dan Evaluasi Rutin : Audit dan evaluasi akhir adalah langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor perbankan. Keduanya berperan penting untuk memastikan jika upaya, prosedur, kebijakan serta praktik yang diterapkan efektif dalam mencegah tindakan korupsi. Evaluasi berfungsi sebagai proses sistematis untuk menilai efektivitas dan dampak dari program atau kebijakan tertentu dalam perusahaan. Dalam konteks pencegahan korupsi, evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana langkah-langkah yang diambil berhasil mengurangi korupsi. Audit dan evaluasi saling melengkapi dalam upaya pencegahan korupsi. Audit lebih fokus pada kepatuhan dan kontrol, sementara evaluasi lebih menekankan hasil dan dampak. Keduanya memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur, serta memperkuat sistem pencegahan korupsi. Dengan melaksanakan audit yang menyeluruh dan evaluasi sistematis, bank dapat memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani korupsi, serta membangun kepercayaan publik dan menjaga integritas organisasi.

Korupsi adalah tindakan ilegal yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi negara. Korupsi dapat terjadi di sector public maupun swasta, termasuk di bidang perbankan yang rentan terhadap praktik korupsi. Tindak pidana di sector ini meliputi segala tindakan yang melanggar peraturan perundang – undangan dan kebiasaan di bidang perbankan. Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 46,47,47a, dan 48 Undang – undang No. 10 Tahun 1998 yang bertujuan memperkaya diri atau orang lain, sehingga merugikan negara, adalah bentuk korupsi di perbankan.

Faktor penyebab korupsi disektor perbankan dapat dilihat dari berbagai aspek. Baik itu dari segi pelakunya, aspek lingkungan / social, atau bahkan aspek hukumnya. Selain itu, kemungkinan pelaporan dan penuntutan rendah karena lemahnya pengawasan internal bank sentral, posisi ekonomi atau politik pelaku dan perilaku pelaku. Penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di bidang perbankan, upaya penanggulangannya dapat dilakukan melalui cara pidana menggunakan hukum pidana dan hukum pidana administrasi dan cara non pidana seperti, perbaikan system pengawasan dan pencegahan korupsi diimplementasikan. Memperkuat system perbankan dengan menerapkan prinsip kehati – hatian, membangun jarring pengaman disektor keuangan, dan membimbing bank dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik dan hubungan masyarakat. Mengingat korupsi merupakan perbuatan melawan hokum, maka perlu adanya peningkatan kesadaran setiap individu agar tidak melakukan tindakan korupsi. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan kecurangan si sector perbankan, perlu dilakukan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Penerapan sanksi terhadap pelaku tidak boleh bersifat diskriminatif agar memberikan jera bagi pelaku. Lebih lanjut, pemberantasan korupsi di industri perbankan sulit dilakukan karena pelaku kejahatan menggunakan pendekatan yang sulit dibedakan dengan pendekatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kejahatan perbankan ini memerlukan respon khusus dari aparat penegak hukum.

Beberapa factor penyebab korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti pelaku, aspek lingkungan / social dan aspek perundang – undangan, sebagai berikut :

a) Aspek Pelaku

Meskipun seseorang memiliki kekayaan yang besar, kesempatan untuk melakukan korupsi dapat mendorongnya untuk melakukannya. Mereka yang memiliki moral rendah dan sikap tamak cenderung lebih mudah terjerat dalam praktik korupsi. Godaan bias dating dari atasan, rekan sejawat, bawahan, atau bahkan nasabah yang memberikan kesempatan terebut. Kekurangan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan dasar, kebutuhan mendesak, dan gaya hidup yang boros juga dapat berkontribusi pada korupsi di sector perbankan.

b) Aspek Lingkungan / Masyarakat

Lingkungan social berperan penting dalam mempengaruhi perilaku korupsi. Masyarakat seringkali mengagungkan kekayaan tanpa mempertanyakan asal – usulnya. Selain itu, budaya suap dapat muncul ketika nasabah berusaha mendapat pinjaman

secara cepat meskipun tidak memenuhi kriteria, dan kemudian memilih untuk menyogok pegawai bank. Masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, menganggapnya sebagai tanggung jawab negara, padahal yang dicuri seharusnya digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

c) Aspek Peraturan Perundang – undangan

Peraturan yang seringkali mengandung cela yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Penyusunan peraturan seringkali tidak didukung oleh analisis yang memadai dan kurang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga banyak yang tidak mengetahui. Jika peraturan disebarluaskan, hal ini dapat mengurangi korupsi karena calon pelaku akan takut pada sanksi yang ada. Namun, penerapan sanksi yang terlalu ringan dan diskriminatif memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum di sector perbankan bias dilakukan melalui hukum perdata, administrasi dan pidana. Untuk memberantas korupsi, perlu ada penerapan hukum pidana dan pendekatan non-pidana, seperti pengawasan yang lebih baik dan penguatan regulasi. Penting juga untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam akuntansi dan keuangan, serta memperluas kewenangan mereka untuk melaksanakan tugas tanpa terbatas pada kerahasiaan bank. Pembaruan undang – undang perbankan juga diperlukan.

Pendayagunaan semua cara untuk memberantas kecurangan di bidang perbankan perlu dilakukan mengingat aparat penegak hukum seolah-olah tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya, dikarenakan :

1. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari pelaku.
2. Keadaan-keadaan di sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dituntut atau dilaporkan.

Penegakan hukum di bidang perbankan dan kejahatan perbankan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam bidang hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Terkait dengan penegakan hukum di bidang hukum pidana, pemberantasan atau upaya penanggulangan korupsi di bidang perbankan dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal. Sarana penal dapat dilakukan melalui penerapan hukum pidana dan hukum administrasi pidana sebagai sarana *shock therapy*. Sedangkan sarana non penal dapat dilakukan melalui cara pengawasan (*built in control*), perbaikan sistem pengawasan dan penguatan regulasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian, menetapkan jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety net*), pemantapan sistem perbankan yang

mengarahkan perbankan kepada praktik-praktik *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian, profesionalisme aparat terus ditingkatkan sehingga memiliki kemampuan integritas yang tinggi, mempunyai kompetensi yang cukup, serta mempunyai reputasi keuangan yang baik.

Untuk menjamin efektivitas edukasi antikorupsi di perbankan perlu dikembangkan modul khusus yang bertujuan untuk mengajarkan materi antikorupsi secara sistematis dan komprehensif. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan modul pendidikan antikorupsi yang dapat digunakan di berbagai jenjang pendidikan yang bermanfaat sampai dunia kerja yang dapat diterapkan. Modul ini dirancang untuk menyesuaikan tingkat pemahaman dari tingkat pemula hingga tingkat menengah lanjutan. Nilai-nilai inti yang diajarkan dalam modul pendidikan antikorupsi antara lain adalah kejujuran, tanggung jawab, keberanian dan sikap kedisiplinan. Implementasi program edukasi dan pelatihan terkait pencegahan korupsi disektor perbankan juga menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam dalam penerapan nilai nilai yang diajarkan. Berikut beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan :

1. Budaya Organisasi : Budaya yang mengutamakan hasil di atas integritas dan antikorupsi penting untuk membangun sikap karyawan perbankan yang adil, dan transparan dapat dicegah melalui pembentukan karakter karyawan yang kuat. Tanpa adanya dukungan dari manajemen puncak, program pelatihan mungkin tidak mendapatkan perhatian yang baik.
2. Ketidakhahaman dan Ketidakpedulian Karyawan : Banyak karyawan mungkin tidak memahami pentingnya pencegahan korupsi atau merasa bahwa hal tersebut tidak relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Tanpa pemahaman yang mendalam, partisipasi karyawan dalam pelatihan bisa rendah.
3. Sumber Daya Terbatas : Program pelatihan yang efektif memerlukan investasi dalam bentuk waktu, dana, dan sumber daya manusia. Banyak bank mungkin mengalami keterbatasan dalam hal ini, terutama di masa krisis atau restrukturisasi, sehingga menyebabkan sumber daya yang terbatas.

4. Kompleksitas Regulasi : Regulasi yang sering berubah dapat menyulitkan bank dalam menyesuaikan materi pelatihan. Karyawan Bank perlu selalu diperbarui mengenai kebijakan dan peraturan baru yang berkaitan dengan pencegahan korupsi saat ini.
5. Pengukuran Efektivitas : Menilai dampak dari program pelatihan adalah tantangan tersendiri. Tanpa metrik yang jelas, sulit untuk menentukan apakah program tersebut efektif dalam mengurangi insiden korupsi dalam lingkungan Perbankan.
6. Teknologi dan Keamanan Data : Dengan meningkatnya digitalisasi, perbankan perlu mengintegrasikan aspek keamanan data dan privasi dalam program pelatihan karyawan. Ancaman siber dapat menambah kompleksitas dalam menangani pencegahan korupsi.
7. Resistensi terhadap Perubahan : Karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam prosedur atau kebijakan. Resistensi ini dapat menghambat pelaksanaan program pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang korupsi.
8. Keterlibatan Stakeholder : Keterlibatan yang kurang dari pihak luar, seperti regulator dan masyarakat umum, dapat membatasi efektivitas program. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Perbankan.

Dengan memahami tantangan-tantangan utama ini, bank dapat merancang dan mengimplementasikan program edukasi dan pelatihan yang lebih komprehensif dan efektif bagi karyawan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Perbankan.

## **5. KESIMPULAN**

Edukasi dan pelatihan karyawan memiliki peranan penting dalam upaya mencegah korupsi di lingkungan perbankan. Melalui program-program ini, karyawan dapat memahami secara mendalam tentang etika, kepatuhan, dan risiko yang terkait korupsi, yang berkontribusi pada pembentukan budaya integritas dalam organisasi. Dengan pendekatan yang terstruktur, edukasi dapat mengurangi ketidakpahaman dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi tindakan korupsi, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Penyebab terjadinya tindakan korupsi dalam lingkungan perbankan seringkali berkaitan dengan tekanan untuk mencapai target, budaya organisasi yang lemah, serta kurangnya pengawasan dan transparansi karyawan. Faktor-faktor ini menciptakan peluang bagi praktik-

praktik korupsi, yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan bank dimasa mendatang. Namun, pelaksanaan program edukasi dan pelatihan juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, keterlibatan semua pemangku kepentingan dan komitmen kuat dari manajemen puncak saat penting untuk mengatasi tantangan ini. Secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi, perbankan perlu mengembangkan program edukasi dan pelatihan yang fleksibel, relevan, dan berkelanjutan, serta memastikan nilai-nilai integritas tertanam dengan kuat dalam diri karyawan Bank dan budaya organisasi. Dengan memahami peran, penyebab, dan tantangan terkait edukasi dan pelatihan dalam upaya pencegahan korupsi, lembaga perbankan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi praktik korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alvin, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Jusuf, A. A. (2015). *Auditing dan jasa assurance* (Jilid 1, Edisi Keduabelas). Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). (2020). *Edukasi dan pelatihan anti korupsi untuk sektor perbankan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(1).
- Hasan, Z., Ramadhan, R. W., & Ayyasy, R. (2024). Implementasi nilai-nilai NKRI dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(1).
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(1).
- Holmes, L. (2015). *Corruption: A very short introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan tahunan 2020*. Diakses dari <https://www.kpk.go.id>
- McBain, D. K. (2019). *Leadership and corruption: A comparative study*. Palgrave Macmillan.
- McFadden, M. E. (2017). *Whistleblowing: A guide to the benefits and risks*. Routledge.
- Moeller, R. R. (2013). *Internal control: A manager's journey*. Wiley.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2008). *The ethics of corporate governance*. Wiley.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2011). *The ethics of corporate governance* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

- Rahman, A. (2020). Regulatory failures in the banking sector: A review. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 1(1).
- Rahn, R. W. (2018). *Corruption and anti-corruption: A global perspective*. Cato Institute.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Strickland, D. A. (2018). *The transparency paradox*. Business Expert Press.